



DOK. GK TV

Aspal jalanan pun daku terjangkau

LPMGEMAKEADILAN

Aktif, Dinamis, Kreatif



Gedung Prof. Satjipto Rahardjo Fakultas Hukum Undip Lt. 3
Jalan Prof. Soedarto, SH, Tembalang
Kota Semarang, Jawa Tengah
50271

Replik

Tajam Beranalisa, Ungkap Realita

MASIHKAH PERANKU DIBUTUHKAN?



LAPORAN UTAMA

Kesejahteraan Guru Honorer,
Sudahkah Terpenuhi?

LIPUTAN KHUSUS

Poliklinik Undip, Pelayanan
Kesehatan Yang Samar Ditemukan

Bacalah artikel lainnya di :
www.lpmgemakeadilan.fh.undip.ac.id

Edisi: Vol.02/XLI/Mei 2018



Bumi Ibu Pertiwi meneguhkan identitasnya sebagai negara *welfare state* atau akrab dikenal dengan negara kesejahteraan. Kesejahteraan menjadi bahan bakar utama dari tentramnya suatu negara, bahkan sebagai alat perekat satu sama lain. Cukup diimajinasikan saja apa jadinya negara yang jauh dari komponen kesejahteraan. Tentu stabilitas keamanan penduduk akan tidak keruan. Itulah sebabnya Replik Edisi Mei Vol. 02 mengangkat isu tentang kesejahteraan para pahlawan tanpa tanda jasa yang tentunya tidak asing lagi di kehidupan kita semua. Berangkat dari berteapatannya dengan hari pendidikan nasional yang jatuh pada tanggal 2 Mei, Kami mengangkat isu yang santer digaungkan oleh pelayan intelektual yang masih berstatus honorer, yakni kesejahteraan selaku guru. Meskipun lebih menitikberatkan dalam hal tersebut, tentunya tidak lupa pula kami untuk mengangkat permasalahan yang kerap mewarnai aksi-aksi mahasiswa, apalagi jika bukan fenomena saat ini dimana pendidikan cenderung dijadikan komoditi oleh pihak yang berwenang. Pada kesempatan kali ini kami memberi kesempatan kepada kawan-kawan FH dari masing-masing angkatan untuk mengangkat suaranya terkait problema tersebut. Tidak lupa tersemat juga pembahasan tentang Poliklinik Undip yang ada ditengah-tengah kita namun seperti tak kasat mata. Tentunya keryitan dahi kita semua setidaknya akan terobati dengan keberadaan Poliklinik Undip.

Setelah mencelupkan pikiran ke hal-hal yang berat, tentu dibutuhkan penyegaran. Rubrik pojok kota akan memberikan refrensi baru untuk memanfaatkan waktu yang ada. Selain itu, terdapat rubrik vakansi yang membahas tentang komunitas permainan tradisional yang mencoba melestarikan permainan dengan rasa kearifan lokal untuk bersanding dengan permainan *modern* yang menyibukkan khalayak untuk menunduk dan mereduksi interaksi. Bagi para pecinta sinema, rubrik resensi film yang mengangkat film *Dead Poet's Society* tentunya akan menambah daftar wajib tonton kalian di akhir pekan. Hari ke hari yang dirasa berat dengan berbagai macam tuntutan yang ada akan semakin nikmat dengan ditemani alunan lagu-lagu *surf rock* dari The Panturas yang siap membawa tsunami ke gendang telinga kalian. Band yang lahir dari rahim daerah Jatinangor ini baru saja merilis album *Mabuk Laut* dibawah naungan La Munai Records. Sensasi kecepatan supir truk Pantura tentu akan membawa hanyut ke dalam setiap lagu yang ada.

Tak lupa mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas terbitnya Replik Edisi Mei Vol. 02 dan banyak terima kasih kepada reporter yang telah berkontribusi penuh dalam pergumulannya menulis tiap rubrik yang ada. *Last but not least*, selamat menikmati teruntuk kalian wahai para pembaca. Salam semangat juang pers mahasiswa

Redaktur Pelaksana Replik

COVER

Depan : Masihkah peranku dibutuhkan?
Oleh : Nanik Rofikoh
Belakang : Aspal jalanan pun daku terjang
Oleh : GK TV
Layouter : Nanik, Gayatri, Yustisia, Reza, Gabriella



STRUKTUR ORGANISASI

PEMIMPIN UMUM Haedar Ibnu R
 SEKTRETARIS UMUM Khairunnisa
 BENDAHARA UMUM Elizabet Flora A
 DEWAN REDAKSI Serin Putriningtyas,
 Ika Dewi, Dwiyanti Putri, Feliza Febiola,
 Aqil Widi, Fadlurrahman Naufal, Afifah
 Fauziah, Dara Citra

PEMIMPIN REDAKSI Ray Habib
 SEKTRETARIS REDAKSI Endah DA
 REDAKTUR ARTISTIK Nanik Rofikoh
 STAF Gayatri Dyah, Hilmi, Reza
 Ibrahim, Gabriella Audrey
 REDAKTUR FOTOGRAFI & GKTV M
 Aldira STAF Rigo, Yudip, Kornel
 REDAKTUR PELAKSANA MAJALAH &
 JURNAL Gilang & Kornelius Benuf
 REDAKTUR PELAKSANA REPLIK
 Faldy Pamungkas

REDAKTUR TABLOID Victoria Dian
 REDAKTUR PELAKSANA MEDIA
 ONLINE Zidney Ilma, Daris Jaka
 STAF Merry, Tia, Syifa, Annes, Stefani,
 Aji, Adinda, Fanisya, Andika, Reza,
 Hayu, Adita, Dwi Retno
 PEMIMPIN PERUSAHAAN Yasmin Nur
 MANAGER RUMAH TANGGA
 KEUANGAN Faza Prabowo
 MANAGER IKLAN DAN PROMOSI
 Iqbal Assegaf

MANAGER PRODUKSI & DISTRIBUSI
 Carlos Bonardo
 STAF PERUSAHAAN Bertha, Alvin,
 Bella, Della, M Eriyanto, Meriana,
 Aliyyah, Anindhita, Jihan, Sindi, Indah,
 Naomy, Emia, Apriadi, Maya, Fahmi,
 Mardiyansyah, Maufal
 PEMIMPIN LITBANG Ricki Pratama
 KASUDIV RISET & KAJIAN
 Amoghasiddi Dewi
 KASUDIV SURVEY & OLAH DATA Tri
 Noviyanti

STAF LITBANG Rico, Sofi, Bob Martin,
 Raeni, Hilmi, Mario, Patricia, Shinta,
 Anggia, Fadil, Hildan, Lutfi, Marcel,
 Sarah, Nurul, Dyanda, Satria
 PEMIMPIN PSDM Satya Adi
 STAF PSDM Rizka, Rizky, Widi, Fitria,
 Rafia, Choirul Novaldo, Fitra, Tika,
 Dinda, Devita, Ayu, Cryistania, Galih,
 Bagoes, Zulfiyar, Dimas, Farah, Selly,
 Raden, Yulia, Ayudia
 PEMIMPIN HUMAS Meilia

Peranginangin
 STAF Saiful, Raras, Qoidatur, M Zakky,
 Wayan, Gibran, Zhafira, Annisa,
 Thania, Khrisna, Hima, Inri, Glory,
 Dimas, Wildan, Rudi, Genio, Amirudin

DAFTAR ISI

1. Laporan Utama
Kesejahteraan guru honorer, sudahkah terpenuhi?
4. Hukum
Student loan, berkembang atau bumerang
7. Liputan Khusus
Poliklinik undip, pelayanan kesehatan yang samar
9. Ada apa dengan empat pilar
Perlukah jam malam di kampus FH Undip?
11. opini
Bullying di lingkungan kawah candradimuka
13. Iklan layanan masyarakat
Cerdas bermedia sosial
15. pojok kota
Tangkringan malam untuk semua kalangan
16. Khalayak bicara
Pendidikan sebagai jalan pembebasan
18. Inspirasi
Tjokroaminoto dan pergerakannya
20. Angkat suara
komersialisasi pendidikan, pantaskah?
22. Tempat
Museum Ronggowarsito, upaya menolak lupa sejarah Kota Semarang
23. Komunitas
Komunitas Hompimpa,
24. Film
Dead poet society
26. Musik
Mabuk laut debut mini album dari The Panturas



Sumber: pontianak.tribunnews.com

Kesejahteraan Guru Honorer, Sudahkah Terpenuhi?

Setiap negara memiliki tujuan negaranya masing-masing, begitu pula dengan Indonesia. Salah satu tujuan negara Indonesia yang termuat dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, yang kemudian diperjelas dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat (5). Dalam mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan upaya pengaktualisasian oleh pemerintah. Terdapat tiga aspek utama yang dibutuhkan yaitu tenaga pengajar, kurikulum, dan sarana-prasarana. Dari ketiga aspek tersebut, aspek tenaga pengajarlah yang paling utama.

Tenaga pengajar atau guru adalah profesi yang sungguh mulia. Mereka tidak hanya mengajar tetapi juga mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tenaga

pengajar dalam dunia pendidikan umumnya dibagi menjadi dua golongan yaitu guru yang sudah berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan guru honorer. Kemendikbud sendiri mengakui saat ini Indonesia masih kekurangan guru. Masalah ini kerap kali diselesaikan secara instan dengan mengangkat tenaga pengajar atau guru honorer. Namun, apakah kesediaan para guru honorer untuk mengajar dan mendidik generasi penerus bangsa dibalas secara adil dan baik oleh pemerintah? Apakah kesejahteraan yang didambakan sudah terwujud atau hanyalah angan belaka?

Menjadi seorang guru honorer tentunya dihadapkan dengan berbagai persoalan, terlebih mengenai kesejahteraan. Menghadapi masalah kesejahteraan guru honorer, pemerintah telah mengambil suatu langkah

yang dinilai cukup berani dengan mengatur sistem pengupahan guru honorer yang diambil dari dana APBD. Kebijakan ini cukup diapresiasi oleh guru-guru honorer. Mereka mengaku telah merasakan perbedaan sistem pembayaran upah, antara sebelum tahun 2017 dengan sesudah tahun 2017 dimana kebijakan tersebut telah berlaku.

Sebelumnya, sistem pengupahan guru honorer masih belum jelas. Tak sedikit guru honorer yang digaji sesuai jumlah jam mengajar dan di bawah UMR. Tentunya kebijakan ini dirasa cukup memuaskan karena gaji yang diberikan sudah mencapai UMR di daerahnya. Namun, untuk mendapatkan gaji sesuai UMR dari APBD, guru honorer harus memenuhi syarat mengajar 24-40 jam dalam seminggu dan hanya berlaku bagi mereka yang termasuk guru honorer yang diangkat Pemda dan memiliki SK Pemda. Di luar syarat tersebut, bagi mereka yang hanya diangkat melalui SK Kepala Sekolah menjadi tanggungjawab sekolah dan gaji yang diberikan ialah tergantung kesepakatan dengan sekolah yang biasanya diambil dari dana BOS. Hal ini dinyatakan oleh bapak Harianto guru di SDN Tembalang yang telah mengajar sejak tahun 2008. Beliau memaparkan bahwa sebagai guru honorer yang awalnya digaji dengan upah yang masih sangat jauh dari kata sejahtera. Pada tahun 2010 beliau hanya mendapatkan upah mengajar sebesar Rp 200.000,- setiap



Sumber: Dok.GK

bulannya. “Dulu waktu saya awal mengajar disini, gaji saya hanya dua ratus ribu per bulan saat tahun 2010”, tutur Pak Harianto. Hal ini tentunya menggambarkan bagaimana pendapatan guru honorer yang masih jauh dari UMR dan kata sejahtera untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, beliau menambahkan bahwa terdapat perbedaan pendapatan setelah tahun 2017 yang kini dirasa sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain mengajar secara formal, ia juga menjadi pembina ekstrakurikuler untuk mendapatkan penghasilan tambahan walaupun tidak seberapa.

Tidak begitu jauh dengan Pak Harianto, pengalaman yang sama juga dirasakan oleh Ibu Dini Fita seorang guru honorer di SMAN 9 Semarang. Pada awal menjadi guru honorer beliau bahkan mengajar di dua sekolah yang berbeda yaitu SMA 9 dan SMK Sudirman. Sebelum ia digaji per jamnya Rp 50.000,00. Meskipun sejak tahun 2017, gaji yang didapatkan sudah membaik dan sesuai UMR tetapi masih saja terdapat kekurangan yang dirasa, pasalnya sistem administrasi sebagai persyaratan untuk menerima gaji dari APBD

dinilai cukup rumit dan berbelit-belit.

Selain itu, pencairan dan penyaluran gaji guru honorer kerap kali terlambat. Diawal tahun 2018 ini, para guru honorer yang digaji oleh APBD Provinsi Jawa Tengah mengalami keterlambatan selama 3 bulan. “Baru dari tahun 2017 kami digaji UMR plus 10 persen untuk tambahan TPP, tapi sayang sekali untuk pencairannya sampai ke kami itu lebih sering terlambatnya, untuk 2018 ini gaji bulan Januari, Februari, Maret baru kami terima di bulan April”, tutur Ibu Dini. Selain itu, ia juga menambahkan bahwa setelah pertengahan tahun 2017, ia dan guru-guru honorer lainnya tidak lagi mendapat tunjangan berupa gaji ke-13 dan THR serta untuk mendapat tunjangan kesehatan masih harus dipotong dari gaji yang ada.

Ketika ditanya mengenai kesejahteraan apabila dilihat dari segi gaji yang diterima, ia menjawab,



Sumber: Dok.GK

“Ya kalau itu dihitung secara matematika tentunya tidak bisa. Kita hanya perlu pintar-pintar mengatur uangnya untuk memenuhi semuanya, apalagi kalo anak sekolah pasti biaya tambah, bagi yang mempunyai anak kecil, dan yang lain-lainnya sekarang mahal, maka

ketika gajinya mundur susu anak saya ikut siapa?”. Untuk memenuhi kebutuhan yang terhambat karena keterlambatan pencairan gaji, SMAN 9 Semarang memiliki PSM (Peran Serta Masyarakat) dimana guru honorer dipinjam sebagian dari gaji yang seharusnya diterima bulan itu dan ketika gaji yang sesungguhnya telah dicairkan pemerintah, kemudian gaji itu dipotong sejumlah pinjaman yang diambil sebelumnya. Namun, lagi-lagi cukup disayangkan kebijakan ini bukanlah kebijakan yang berasal dari pemerintah melainkan inisiatif sekolah sendiri. Tentu saja tidak semua sekolah memiliki program seperti ini dan pastinya para guru yang terkena imbas dari keterlambatan gaji ini sangat terganggu dalam menghidupi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan paparan di atas dapat dilihat beberapa perbedaan antara guru honorer dan guru PNS. Perbedaan yang terlihat jelas ialah dari segi kesejahteraan, tugas-tugas, serta jaminan untuk melangsungkan profesi sebagai guru. Kesejahteraan sebagai guru honorer masih berada di bawah guru PNS dalam hal upah maupun tunjangan-tunjangan. Tentu saja gaji yang diterima guru PNS jauh di atas guru honorer ditambah dengan berbagai tunjangan dan jaminan yang diberikan. Bahkan dalam hak untuk mendapatkan sertifikasi, guru PNS lebih diutamakan dibandingkan guru honorer. Dari segi penerimaan upah, para guru honorer yang ditanggung oleh APBD pemerintah masih dirumitkan dengan

berbagai sistem administrasi. Tentunya hal ini sangat mengusik guru honorer dalam menjalankan tugas untuk mendidik siswa di sekolah yang tidaklah termasuk suatu pekerjaan yang harus ekstra tenaga. Bahkan untuk jaminan kesehatan saja gaji yang seharusnya diterima masih perlu dipotong. Mengenai beban mengajar, guru honorer sering mendapat jatah mengajar di luar porsinya. Banyak di antara mereka yang mengajar tambahan seperti mengajar ekstrakurikuler sekolah hanya sekedar untuk mendapat penghasilan tambahan. Bila diuraikan lebih lagi pastinya masih banyak perbedaan –perbedaan antara keduanya.

Sejatinya setiap guru mengharapkan adanya kesejahteraan yang menyeluruh baik antara guru tetap maupun guru honorer. Terlebih para guru honorer yang sampai saat ini masih belum mendapatkan dan merasakan kesejahteraan. Dalam Undang-Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tidak terdapat perbedaan hak pada guru honorer maupun guru PNS. Oleh karena itu, kesejahteraan pada guru honorer seharusnya disetarakan dengan guru PNS seperti hak-hak yang terdapat pada pasal 14-16 UU No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Mengenai masalah instrumen hukum yang menjamin kesejahteraan guru honorer, Muhamad Azhar yang merupakan dosen HAN Fakultas Hukum Undip mengatakan bahwa instrumen-instrumen hukum yang ada sudah



cukup dan dinilai sudah men-sejaterakan guru dari segi substansinya. Sudah banyak peraturan yang dianggap men-sejaterakan guru misalnya melalui UU No. 14 Tahun 2005, Perda masing-masing daerah, dan Peraturan Kemendikbud. Jaminan dari pemerintah dianggap lebih baik dari sebelumnya dimana telah dijamin untuk mendapat kesempatan sertifikasi dan jaminan kesehatan BPJS. Dalam undang-undang tersebut ia menilai tidak ada perbedaan antara guru PNS dan guru honorer tetapi yang menjadi persoalan ialah tidak semua peraturan tersebut dilaksanakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah. Itulah yang menyebabkan kesejahteraan guru yang belum terpenuhi. Hal tersebut terjadi karena perbedaan anggaran di setiap daerah di Indonesia. Bagi kota-kota besar yang mendapat suntikan APBD yang besar tentunya dapat menjalankan peraturan tersebut tetapi tidak dengan kota-kota kecil dan terpelosok Indonesia yang mengalami keterbatasan anggaran untuk menggaji guru- guru honorer. Ia juga menambahkan terkait usul bagi pemerintah untuk meng-

adakan suatu kebijakan yang diskriminatif positif. Diskriminatif dalam hal perbedaan sistem pengupahan guna tujuan positif. Maksudnya adalah pemberian gaji atau upah bagi guru-guru honorer daerah kecil dan terpelosok yang seharusnya lebih tinggi dibandingkan di kota yang tentunya juga diberi syarat seleksi yang terukur. Menurutnya, hal ini perlu dilakukan karena mayoritas guru honorer yang belum sejatera ialah yang berasal dari kota-kota kecil padahal daerah tersebut sering kekurangan tenaga pengajar profesional.

Adapun masalah kesejahteraan guru honorer yang telah menjadi gulungan benang kusut harus cepat diselesaikan. Pemerintah dan instansi terkait diharapkan duduk bersama untuk membenahi nasib guru honorer. Selain itu, perlu adanya komunikasi dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan kesejahteraan guru honorer di Indonesia. Keberadaan mereka yang sangat dibutuhkan dan kesediaan mereka untuk mendidik generasi penerus bangsa kiranya patut dihargai tak sekedar penghormatan belaka tetapi juga tindakan nyata.

Selly & Amir Yusron



STUDENT LOAN, BERKEMBANG ATAU MALAH MENJADI BUMERANG?

Presiden Joko Widodo telah memberi PR (pekerjaan rumah) kepada para pimpinan perbankan Indonesia pada Hari Kamis, 15 Maret 2018 di Istana Negara. Pekerjaan rumah bagi para pimpinan perbankan Indonesia tersebut adalah permintaan pengeluaran produk finansial baru berupa kredit pendidikan atau *student loan* oleh perbankan. Menurut beliau, jika Indonesia memiliki produk kredit pendidikan, maka hal ini dapat mendorong perilaku kredit konsumtif yang akan berpindah ke hal-hal yang bersifat produktif. Usulan *student loan* oleh presiden ini bukan tanpa alasan, beliau berkaca pada

Amerika Serikat, yang dianggap sukses dalam capaian kredit perbankan. Di sana, total pinjaman kartu kredit mencapai 800 miliar dolar AS. Sementara total khusus kredit pendidikan lebih besar nilainya, yakni mencapai 1,3 triliun dolar AS. Sebetulnya *student loan* yang dimaksud oleh Presiden Jokowi bukan barang baru. Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI) pernah dijalankan Kementerian Pendidikan pada tahun 1980-an. Namun program KMI tersebut dinilai tidak berjalan efektif karena banyak kreditur yang tidak melunasi pinjamannya. Wacana memunculkan lagi pinjaman dana pendidikan ini jelas menimbulkan pro dan kontra di masyarakat.

Student loan adalah pinjaman yang ditawarkan oleh pihak perguruan tinggi untuk mahasiswa agar dapat melunasi biaya kuliah, buku-buku, dan biaya hidup. Peminjaman yang diberikan memiliki kontrak yang berbeda-beda sesuai dengan kebijakan perguruan tinggi. Memang program *student loan* ini diprediksi dapat membantu para mahasiswa Indonesia untuk terus berkuliah tanpa pusing memikirkan biaya studi hingga biaya hidupnya. Karena pada kenyataannya banyak mahasiswa di Indonesia yang memilih untuk berhenti kuliah karena terhalang masalah ekonomi. Tidak hanya mahasiswa, siswa Sekolah

Menengah Atas pun banyak yang enggan melanjutkan studinya ke perguruan tinggi karena mengalami masalah yang sama, yaitu masalah ekonomi.

Memang seharusnya pemerintah turut andil dalam penyelesaian masalah “klasik” ini. Sesuai dengan pasal 31 ayat (1) UUD NRI 1945 disebutkan bahwa “Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan.” Hal ini berarti, Negara tidak boleh lepas tangan terkait penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga negaranya. Dalam pasal 76 UU no 12 tahun 2012 ayat (1) dan ayat (2) tentang pendidikan tinggi, pemerintah memang berkewajiban untuk memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dengan beberapa cara diantaranya dengan beasiswa kepada Mahasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya Pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan. Dengan melihat isi dari pasal di atas, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa *student loan* ini dirasa cukup tepat untuk menangani masalah ekonomi para mahasiswa di Indonesia. Namun kita semua perlu menyadari bahwa *student loan* dapat menjadi masalah bagi kreditur dan juga Indonesia sebagai debiturnya.

Amerika serikat sebagai inspirator dalam pengadaan program *student loan* di Indonesia melaksanakan kredit pendidikan di Amerika dengan melibatkan pihak



Sumber: electricliterature.com

pemerintah dan swasta (institusi keuangan). Pemerintah berperan dalam penyediaan dana dan pengawasan. Sedangkan swasta bertugas mengelola dan menyalurkan dana kepada warga. Tentu saja, ada bagi untung antara kedua pihak dari bunga kredit yang didapat. Sejak 1958, program kredit pendidikan di Amerika terus diperkuat dengan sederet kelengkapan undang-undang dan peraturan. Teknis pelaksanaannya pun terus diperbarui. Misal, akses pada kredit ini semakin dibuka lebar. Saat ini, siapa saja baik warga Amerika maupun warga non-Amerika dengan kondisi tertentu, seperti pengungsi, bisa menikmati program *student loan* ini. Selain itu, sejak 2010 pemerintah Amerika tidak lagi melibatkan swasta. Seluruh proses penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran kredit serta pengawasannya dilakukan oleh pemerintah. Akibatnya, banyak institusi swasta yang mengeluarkan produk kredit pendidikan

sendiri.

Kesuksesan Amerika Serikat dalam penyelenggaraan kredit pendidikan bisa dilihat dari dua aspek. Pertama, peningkatan nilai kredit. Kedua, peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi. Kredit pendidikan telah terbukti membuka akses pendidikan tinggi yang lebih luas pada warganya.

Namun, pada kenyataannya program ini juga menimbulkan masalah lain yang lebih kompleks. Dalam perkembangannya, kredit pendidikan menjadi pilihan kebanyakan warga Amerika untuk membiayai kuliah. Jumlah kredit pendidikan per orang di Amerika pada 2014 berkisar 39 ribu sampai 42 ribu dolar. Jumlah ini terus meningkat seiring biaya kuliah yang semakin mahal dan bantuan pemerintah yang terus berkurang. Tentu saja jumlah ini di luar bunga yang harus mereka bayar di kisaran 4-10 persen. Mereka yang berhutang hanya merasakan lega sesaat. Mereka diberikan kesempatan beberapa bulan, atau

setahun setelah lulus sebelum akhirnya dikenai kewajiban membayar kredit. Lilitan hutang kuliah yang tak sedikit membuat banyak sarjana kesulitan dalam memulai kehidupan setelah lulus dari jenjang pendidikan tinggi. Mereka tetap dikenakan bunga walaupun jumlah pembayarannya disesuaikan dengan pendapatan, semakin lama masa pelunasannya, semakin besar pula bunga yang harus dibayarkan. Kondisi inilah yang membuat banyak pihak menolak tentang usulan *student loan* ini. Apalagi, kemungkinan para kreditur yang mangkir dari kewajiban membayar cicilan *student loan* mereka dapat menyebabkan kerugian bagi negara.

Menurut Mustolih Siradj, Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, wacana *student loan* atau kredit pendidikan ini memunculkan kekhawatiran di masyarakat. Kekhawatiran itu menjadi bukti pemerintah tidak bijak dalam mengurus anggaran pendidikan. Negara dikhawatirkan menghindari dari tanggungjawab menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Padahal tanggungjawab itu merupakan mandat konstitusi sebagaimana tertuang jelas dalam Pasal 31 UUD 1945, yakni negara wajib mengalokasikan anggaran minimal 20 persen dari APBN untuk pendidikan. Beliau berpendapat bahwa, pada kenyataannya perintah konstitusi belum secara paripurna dilaksanakan oleh

negara. Selain kualitas pendidikan yang saat ini belum dinikmati oleh semua warga negara. Ia juga menambahkan bahwa masyarakat merasa khawatir bila wacana tersebut nantinya akan membuka peluang liberalisme dan konsumerisme di sektor pendidikan dan pada akhirnya hanya kalangan tertentu saja yang dapat menjangkau akses pendidikan yang baik dan berkualitas.

Meskipun menimbulkan pro dan kontra di masyarakat, bank umum di Indonesia sudah mulai meluncurkan program *student loan* bagi para pelajar. Contohnya adalah PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BTN) telah meluncurkan kredit untuk memenuhi kebutuhan pendidikan (*student loan*) dengan plafon hingga Rp 200 juta dan bunga hanya sebesar 6,5% flat selama lima tahun. Senada dengan apa yang dilakukan oleh BTN, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) resmi meluncurkan *student loan* yang diberi nama "Briguna Flexi Pendidikan." Dalam peluncurannya BRI bekerja sama dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI (Kemristekdikti), Namun, produk ini tidak memberikan pinjaman pendidikan kepada seluruh jenjang kuliah layaknya *student loan* di Amerika Serikat (AS) yang dicontohkan Jokowi. Briguna Flexi Pendidikan ini merupakan *student loan* dari BRI dengan skema pembiayaan yang dikhususkan untuk mahasiswa S2 dan S3 yang sudah memiliki upah/ penghasilan tetap. Produk ini memiliki keunggulan berupa *grace period* atau

kelonggaran waktu pembayaran. Artinya, mahasiswa diperbolehkan hanya membayar bunga berjalan selama masa pendidikan kuliah sedangkan pokok pinjaman dapat dibayarkan setelah mahasiswa lulus sampai dengan jangka waktu pinjaman berakhir.

Untuk mewujudkan *student loan* seperti apa yang diusulkan presiden Joko Widodo diperlukan koordinasi para pihak terkait untuk membuat infrastruktur sistem dan regulasi yang komprehensif, serta mengidentifikasi sumber pen-danaannya. Kita sangat perlu belajar dari pengalaman negara lain dan juga pengalaman dari penerapan Kredit Mahasiswa Indonesia pada tahun 1980-an agar tidak terjadi kegagalan yang serupa. Sesuai dengan UU No 12/2012, perlu ditentukan juga apakah *student loan* ini akan ada dalam area 'mahasiswa tidak mampu' dan 'kredit tanpa bunga' atau memperluas area melalui revisi UU atau cara lainnya. Semoga usulan *student loan* ini tidak malah menjadi bumerang bagi Indonesia.

Farah Rana



Poliklinik Undip, Pelayanan Kesehatan Yang Samar Ditemukan

Kesehatan menjadi bagian yang paling vital untuk menjalankan aktivitas sehari-hari karena kesehatan sangat berpengaruh bagi diri kita agar bisa menjalani aktivitas dengan lancar. Kita memerlukan badan yang sehat, stamina yang kuat, serta badan yang bugar untuk melakukan berbagai aktivitas. Apalagi kita sebagai mahasiswa yang dituntut untuk selalu belajar, menjalankan berbagai aktivitas keorganisasian dan kepanitiaan, serta bagi mahasiswa yang memiliki tuntutan untuk mengikuti lomba yang kadang kala latihannya tak mengenal waktu. Sebagai seorang mahasiswa, apabila jatuh sakit maka hal itu sama sekali tidak boleh diremehkan. Apabila hal yang tidak diharapkan tersebut tiba, maka memanfaatkan fasilitas kampus seperti Poliklinik kampus, contohnya adalah Poliklinik yang ada di Universitas Diponegoro (Undip) dapat menjadi salah satu alternatif. Sebuah

Poliklinik yang menawarkan fasilitas perawatan kesehatan yang di khususkan untuk perawatan pasien rawatjalan.

Poliklinik Universitas Diponegoro merupakan fasilitas kampus yang melayani bidang kesehatan untuk mahasiswa dan juga untuk umum. Namun kebanyakan yang berobat di Poliklinik Undip adalah mahasiswa. Mengenai hari kerja dari Poliklinik Undip sendiri adalah setiap Senin sampai dengan Jumat, buka mulai pukul 09.00-12.00 WIB, waktu yang cukup singkat untuk jam buka dari Poliklinik. Dokter dari poliklinik Undip ini sebanyak 5 orang. Kelima dokter tersebut memiliki jadwal masing-masing untuk menjaga setiap harinya. Berbicara mengenai dokter yang menjaga poliklinik, kelima dokter tersebut didatangkan langsung dari dosen yang mengajar di Fakultas Kedokteran Undip. Tidak ada sistem *rolling* untuk dokter yang memberikan pelayanan di poliklinik, sehingga dokter tersebut bekerja secara

permanen. Kecuali, dokter tersebut sedang melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi dan hal lain sebagainya yang menyebabkan dokter tersebut tidak dapat menjaga di Poliklinik Undip, maka dapat digantikan oleh dokter yang tidak termasuk dokter permanen di Poliklinik Undip.

Untuk prosedur berobat didalam poliklinik itu sendiri mahasiswa yang berobat cukup menunjukkan kartu tanda mahasiswa (KTM) sebagai administasinya. Biaya untuk berobat di Poliklinik Undip bagi mahasiswa baru S1 maupun S2 gratis tidak dipungut biaya apapun, tetapi berbeda dengan mahasiswa lama seperti yang telah memasuki semester 3 keatas yang di bebaskan biaya Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah). Selain untuk mahasiswa, Poliklinik Undip juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Akan tetapi, masyarakat umum yang memanfaatkan Poliklinik Undip untuk berobat masih terbilang sedikit, karena masyarakat kerap beranggapan bahwa Poliklinik Undip hanya melayani dosen, karyawan, dan mahasiswa Undip saja. Jika ada masyarakat umum yang berobat di Poliklinik Undip, biaya yang di bebaskan sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh



ribu rupiah) sudah termasuk obatnya.

"Jenis obat-obatan di Poliklinik Undip sendiri terbagi menjadi dua macam, yakni obat generik dan paten dimana pemberiannya tergantung penyakit yang diderita

oleh pasien" ujar Ibu Sinta, selaku petugas Poliklinik Undip. Poliklinik Undip pun termasuk poliklinik umum yang menangani penyakit-penyakit umum atau tergolong ringan, sehingga jika penyakit pasien yang berobat setelah didiagnosis tergolong penyakit berat, misalnya penyakit kanker, maka bisa langsung dirujuk ke spesialis yang menangani penyakit tersebut.

Fasilitas di Poliklinik Undip berlaku standar sesuai dengan poliklinik pada umumnya. Di poliklinik ini tidak menyediakan ambulans karena fasilitas tersebut hanya ada di Rumah Sakit Nasional Diponegoro (RSND). Jika memang keadannya darurat bisa langsung dirujuk ke RSND. Namun, hal ini lebih dikarenakan Poliklinik Undip hanya berlaku Poliklinik Umum yang menangani rawatjalan.

Untuk anggaran obat dan lain-lain telah disesuaikan oleh Undip dengan keperluan yang dibutuhkan poliklinik ada di bagian kemahasiswaan yang mana berbeda dengan RSND. Poliklinik Undip berdiri sendiri sesuai dengan Peraturan Rektor, sehingga mahasiswa yang berobat mendapatkan keringanan biaya. Berbeda dengan RSND yang pengelolaannya tidak



Sumber: Dok.GK

dikelola langsung oleh Undip melainkan dikelola oleh pihak swasta, hal ini merupakan perbedaan yang sangat mencolok antara Poliklinik Undip dengan RSND.

Wawancara sempat dilangsungkan dengan Renaldi Setaiwan salah seorang mahasiswa Universitas Diponegoro dari Fakultas Ilmu Budaya, Jurusan Ilmu Perpustakaan yang pernah berobat di Poliklinik Universitas Diponegoro. Tanggapan atas pengalamannya berobat menuai hasil yang kurang positif mengenai sistem pelayanan dari Dokter di Poliklinik Undip. Mahasiswa tersebut menuturkan ketika sedang berobat, saat itu sedang sakit kulit dan ditemani oleh seorang temannya untuk berobat di poliklinik. Sesampainya disana mahasiswa itu disuruh menunggu hingga pukul 11.00 WIB karena dokter yang berjaga belum datang. Setelah menunggu cukup lama ketika diperiksa mahasiswa tersebut berharap akan mendapatkan pelayanan yang baik, tetapi hal tersebut tidak seperti yang diharapkan. Ia tidak disuruh untuk membuka bajunya, tidak disuruh untuk tiduran terlebih dahulu atau ditanya mengenai hal yang dikonsumsi sebelumnya. Dokter tersebut langsung memberi saran kepada mahasiswa tersebut untuk langsung test lab di RSND dan diberi obat golongan pertama sekelas Puskesmas. Menurutnya, dokter di Poliklinik kurang bekerja sebagaimana mestinya dan ia lebih memilih

untuk berobat di RSND walaupun berobat di Poliklinik tidak mengeluarkan biaya karena mahasiswa tersebut saat itu masih termasuk mahasiswa baru dan prosedur berobat yang mudah karena cukup menunjukkan KTM saja sudah bisa mendaftar untuk berobat di poliklinik.

Komentar dari mahasiswa yang kami wawancarai mengenai poliklinik Universitas Diponegoro yaitu "ada tapi seperti tidak ada" ujar Renaldi, terkait dari pelayanannya serta belum dikenalnya secara luas oleh civitas akademika Universitas Diponegoro itu sendiri. Kriktiknya untuk Poliklinik yaitu bahwa Undip bisa membangun rumah sakit sendiri di wilayah Universitas Diponegoro namun tidak bisa untuk membangkitkan Poliklinik apalagi biaya untuk berobat sangat murah bahkan bisa gratis untuk mahasiswa baru, hal-hal yang seperti itu yang dibutuhkan oleh para mahasiswa.

Kritik selanjutnya mengenai jadwal dari dokter yang kurang maksimal sehingga membuat pelayanan dari poliklinik kurang maksimal pula. Saran dia untuk poliklinik menurut pengalamannya berobat yaitu pemberian jadwal dokter yang benar-benar jelas agar dokter selalu ada dan siap dibutuhkan kapan saja tanpa menunggu kehadiran dari dokter tersebut.

Jihan Nina Lestari & Bagoes Yanwar



Perluakah Jam Malam Di Kampus FH Undip?

Fakultas Hukum (FH) merupakan civitas yang terdapat dalam ruang lingkup sosial humoniora (soshum). Mahasiswa Soshum dikenal sebagai mahasiswa yang kritis dan gemar berorganisasi serta mengembangkan *softskill*-nya. Namun, sangat disayangkan di lingkungan kampus FH Universitas Diponegoro (Undip) terdapat pembatasan mengenai jam malam.

Mahasiswa pada dasarnya merupakan insan yang beruntung, selain itu mahasiswa juga didefinisikan sebagai kaum masyarakat terpelajar yang memiliki kesempatan untuk mengenyam pen-

didikan dalam perguruan tinggi. Sehingga, pada realitanya masyarakat mempunyai ekspektasi tersendiri kepada mahasiswa sebagai cendekiawan yang dianggap berintegritas dan tidak pernah puas akan sesuatu, selalu menanyakan kebenaran, dan oleh karenanya menjadi sebuah harapan bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk menjadi harapan bagi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mahasiswa perlu ruang diskusi untuk mendiskusikan isu yang ada di masyarakat sekitar, seputar Undip secara umum maupun

fakultas di Undip pada khususnya, serta isu-isu nasional. Dengan adanya diskusi dari berbagai pihak diharapkan dapat menyatukan pemikiran masyarakat FH agar dalam mengontrol setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ataupun kampus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat serta Pancasila.

Menurut Ketua Senat FH Undip, Mahfud, FH hanyalah berusaha memenuhi peraturan rektor yang sudah ditetapkan, yakni mengenai pembatasan jam malam yang merupakan kewenangan masing-masing fakultas. Pember-

lakuan jam malam bukan sekadar dibatasi, tetapi juga sebagai upaya preventif dari hal-hal yang tidak diinginkan.

Latar belakang pemberlakuan jam malam sebenarnya dikarenakan kejadian pada masa lampau saat jam malam tidak dibatasi, dan berkaca pada fakultas lain juga pemberlakuan jam malam sering membuat mahasiswa menggunakan fasilitas kampus untuk tempat melakukan tindakan yang bertentangan dengan asusila.

Pada Fakultas Teknik Jurusan Sipil, menurut Abednego sebagai mahasiswa Teknik Sipil 2016, pemberlakuan jam malam berlaku hingga pukul 12 malam, serta pada beberapa kesempatan jam malam pada fakultas yang bersangkutan dapat mentolerir adanya jam malam, karena pada suatu waktu terdapat sebuah agenda fakultas yang mengharuskan mahasiswa untuk menginap di area Fakultas Teknik Sipil Undip. Ia pun terkejut dengan pemberlakuan jam malam di FH Undip, padahal hakikat seorang mahasiswa FH yang identik dengan berdiskusi satu sama lain untuk mempertajam wawasan serta mengasah kepekaan sosialnya.

Jika kita melihat jam malam di FH universitas lain yakni Universitas Trisakti, mahasiswa hingga larut malam masih bisa berdiskusi di sekitar kampus. Universitas Trisakti sendiri merupakan universitas yang berada di daerah Jakarta. Universitas Trisakti merupakan kampus perjuangan reformasi sehingga mereka ingin

mempertahankan julukan tersebut dengan memberikan ruang diskusi kepada mahasiswanya. Kehidupan malam di kampus tersebut jauh berbeda dengan Undip. Jika di Undip pada malam hari begitu terasa rawan kejahatan tidak halnya di FH Trisakti yang terasa begitu hangat, mahasiswanya masih ramai berdiskusi, walaupun pada peminjaman ruangan sendiri masih dibatasi jamnya. Adanya jam malam di area FH Undip tersebut kerap disalahgunakan fungsinya oleh mahasiswa yang tidak bertanggung jawab, hal itulah yang dipikirkan oleh Dekanat FH Undip sendiri.

Jika kita berpikir secara mendalam, bahwasanya pemberlakuan jam malam memang terkesan membatasi mahasiswa dalam menggunakan fasilitas umum, meskipun mahasiswa FH Undip telah membayar Unit Kuliah Tunggal (UKT) dan Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), tetap saja terdapat aturan yang bertujuan untuk menjaga ketertiban pada area FH Undip itu sendiri. Hal yang sepatutnya dicegah sudah seharusnya dicegah dan pihak kampus tentunya tidak ingin kejadian seperti masa lampau dengan adanya hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan FH. Hal tersebut senada diutarakan salah satu mahasiswa FH Undip yakni Rico yang berujar bahwasannya pihak Dekanat FH Undip pasti memiliki pertimbangan yang kuat untuk memberlakukan jam malam ini, apabila kita sebagai mahasiswa memang menginginkan adanya pencabutan jam malam, maka kita harus mencari ke-

percayaan Dekanat FH Undip untuk mempergunakan aktivitas di kampus dalam arti positif.

Karena sebagai mahasiswa FH, kita memerlukan ruang diskusi untuk mengembangkan pola berpikir kita, jauh lebih berbahaya jika kita berkumpul di luar lingkungan kampus yang tidak ada pengawasannya sama sekali. Apabila dari mahasiswa sendiri berani menjamin penggunaan ke arah positif maka Dekanat FH Undip pun tak perlu membatasi apalagi menuju Undip sebagai kampus riset berkelas dunia.

Fadhil Widhiantomo



Sumber: bubhub.com.au

Maraknya Bullying di Lingkungan Kawah Candradimuka

Kasus *bullying* atau perundungan pada anak-anak meningkat dan tidak bisa dibiarkan, karena akan menimbulkan masalah serta meresahkan masyarakat. *Bullying* menjadi perhatian Kementerian Sosial saat ini. Dari data survei, sebanyak 84 persen anak usia 12 tahun hingga 17 tahun pernah menjadi korban *bullying*. Beberapa kasus *bullying* yang terjadi, tidak lama ini sempat membuat masyarakat Indonesia geram karena dilakukan secara sadis.

Biasanya *bullying* ini dilakukan untuk mempersepsikan dirinya lebih kuat. Dengan maksud mengerjai, membahayakan fisik, mental atau emosional melalui pelecehan dan penyerangan. Tak sedikit kasus *bullying* di Tanah Air yang menimbulkan trauma, luka, bahkan hingga merenggut nyawa.

Terkadang para *bullies* ini tak sadar kalau perilakunya ini memberikan dampak buruk bagi perkembangan jiwa korbannya.

Terlebih lagi kasus *bullying* dalam bangku sekolah masih sering kita jumpai dari mulai murid SD sampai dalam bangku perkuliahan, yang seharusnya fase tersebut dijadikan untuk menuntut ilmu bukan sebagai ajang untuk adu kekuatan atau *bullying*.

Salah satu kasus *bullying* terjadi pada seorang siswa yang masih duduk di bangku kelas 2 SDN Longkewang, Sukabumi yang berinisial SR, ia meninggal dunia setelah bertengkar dengan seorang temannya di sekolah. Korban tidak hanya dipukul, tapi telinga korban pun disumbat menggunakan keripik dan disiram dengan air. Banyak sekali kasus *bullying* di Indonesia, tidak hanya antar murid saja tetapi

bullying bisa terjadi antara murid kepada gurunya, contoh pada kasus yang terjadi di awal tahun 2018 di Sampang seorang guru dianiaya hingga berujung kematian oleh muridnya sendiri karena murid tersebut tidak terima atas teguran dan coretan cat ke muka yang diterimanya akibat tidak mengerjakan tugas. Mungkin, sang guru tidak selamanya benar dalam metode menghukum atau menegur siswanya, tetapi kekerasan dan penganiayaan tidak seharusnya terjadi dalam kasus ini.

Menurut pandangan hukum, pelaku *bullying* terhadap anak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Bagi yang melanggarnya akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 Juta.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Susana Yembise mengatakan aksi *bullying* dapat dijerat pidana.

Yohana mengatakan, berdasarkan peraturan yang dibuat, *bullying* bisa dijerat lewat sistem peradilan anak. "Kalau sampai dimajukan ke ranah hukum, akan berhadapan dengan sistem peradilan pidana anak, yang sistemnya *restorative justice* sehingga larinya akan ke mediasi," jelasnya.

Selain itu Yohana beranggapan bahwa *bullying* dapat dilatarbelakangi faktor kekerasan di keluarga dan lingkungan. "Ada beberapa faktor. Pertama, anak itu berasal dari keluarga yang suka melakukan kekerasan fisik di rumah dan kekerasan yang lain. Jadi mereka meniru apa yang dilakukan orang tua dan lingkungan tempat mereka tinggal. Akhirnya di sekolah, bila terjadi kekacauan sedikit atau kericuhan, larinya ke masalah *bullying* begitu," kata Yohana.

Para korban *bullying* biasanya mengalami guncangan jiwa hingga mengalami depresi, prestasi akademis menurun drastis, malas pergi ke sekolah, menjadi penakut,

sering marah-marah, mudah tersinggung, sering berbohong, menarik diri dari pergaulan, dan bahkan banyak yang mencoba bunuh diri. Mereka juga seringkali tidak memiliki keberanian untuk membela diri atau melaporkan ulah pelaku kepada pihak sekolah atau orangtuanya karena beranggapan sebagai menelan simalakama, bila melapor belum tentu menyelesaikan persoalan karena acapkali justru si korban disalahkan (*victim blaming*) karena dianggap terlalu lemah atau pelaku semakin agresif demi membalas dendam karena telah dilaporkan.

Psikolog sekaligus aktivis gerakan anti-*bullying*, Riana Cahyani di Yogyakarta melihat, secara nasional Indonesia sudah menaruh perhatian terhadap tindakan semacam ini. Ada kurikulum anti-*bully*, ada gerakan nasional, dan bahkan penerapan kebijakan kota atau daerah yang ramah anak di seluruh tanah air. Tantangannya saat ini adalah menerapkan semua itu dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Guru-guru terutama harus dilatih untuk memahami apa itu *bully*, bentuk-bentuk dan cara pencegahan serta penanganannya. Daerah juga harus mempersiapkan bantuan psikolog di tingkat kecamatan, untuk memberikan konsultasi ke sekolah.

Hal senada juga disampaikan perwakilan komunitas SudahDong yang merupakan gerakan anti-*bullying*, Ira Savitri. Menurutnya, peran serta keluarga dan lingkungan untuk memberikan edukasi. Dia meyakini baik korban

maupun pelaku *bully* baik di sekolah maupun lingkungan tidak boleh ditinggalkan.

"Tentunya untuk memutus mata rantai *bully* selain rehabilitasi dan trauma healing, pendekatan dengan informatif serta edukasi bisa memberikan pendidikan yang baik. Tentunya bagaimana menghentikan diri sendiri, karena indikasi sebagai pelaku *bully* juga harus distop agar tidak menjurus hingga perbuatan *bullying*," jelasnya.

Selain itu, pencegahan dan penanganan *bullying* adalah dengan menanamkan kesadaran pada diri sendiri untuk menghargai privasi orang lain, bahwa tak seorangpun berhak mengganggu ketenangan hidup orang lain dan perilaku agresi adalah sebuah pelanggaran hukum yang dapat dituntut di muka pengadilan.

Berbagai cara bisa dilakukan untuk mencegah perilaku *bullying* antara lain dengan melaporkan ke pihak sekolah agar si pelaku diberi peringatan. Bila ulah pelaku sudah sangat mengganggu dan setelah dilakukan teguran secara persuasif namun tidak juga terjadi perbaikan, jangan ragu-ragu, untuk melaporkan ke aparat kepolisian. Sekali lagi, masyarakat sebaiknya sepakat untuk mencegah terjadinya praktik *bullying* oleh siapapun dan kepada siapapun.

Zhafira Naura



Cerdas Bermedia Sosial, Media Sosial Mencerdaskan

Media sosial adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blok, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual.

Pasal 27 sampai 29 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 Tentang Informatika dan Tansaksi Elektronik:

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Infor-masi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pen-cemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/ atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau peng-ancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

*Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPM Gema Keasylan



Dok. Gk

Angkringan Malam Tempat Untuk Semua Kalangan

Kota Semarang identik dengan berbagai macam jenis kuliner uniknya. Baik itu dalam bentuk warung, jajanan pinggir jalan, restoran, dan lain sebagainya. Makanan yang banyak diburu untuk memuaskan keinginan perut pun beragam sekali, dari makanan ringan atau makanan kecil sampai makanan besar, untuk harganya pun juga variatif, ada yang murah bahkan mahal sekalipun. Berburu makanan murah, lezat dan mengenyangkan, pasti diinginkan oleh semua orang, salah satu dari pilihan makanan yang memenuhi kriteria tersebut yang tersedia di Kota Semarang adalah Angkringan Pak Gik. Angkringan Pak Gik merupakan warung yang menyediakan nasi kucing, untuk popularitas yang disandang tidak perlu diragukan lagi. Angkringan ini begitu legendaris di Kota Semarang, atau bisa disebut juga icon-nya nasi kucing Semarang.

Angkringan yang satu ini sangatlah unik, berlokasi di Jalan Wotgandul sebelah Kali Semarang, kurang lebih 20 m dari Jalan Gajah Mada, para penggemar nasi kucing ini lebih sering menyebutnya Nasi Kucing Pak Gik Gajahmada. Angkringan ini sudah ada lebih dari 50 tahun yang lalu. Hal yang begitu berbeda dengan angkringan lainnya adalah jam buka, apabila angkringan lain buka pada sore hari hingga malam, Angkringan Pak Gik ini baru buka

tengah malam, meski di spanduknya bertulis buka pukul 24.00, namun kerap angkringan ini sudah buka sekitar pukul 23.00. Kucingan Pak Gik melayani penggemarnya hingga pagi hari, namun makanan yang tersedia tersisa sangat sedikit jika telah memasuki pukul 03.00. Tempat ini begitu laris dikunjungi pelanggan, bahkan tidak hanya orang-orang yang tinggal di wilayah Semarang, orang luar kota pun gemar mengunjungi Angkringan Pak Gik untuk membuktikan kemahsyurannya.

Orang-orang lebih familiar dengan istilah warung kucingan, kucingan disini diartikan dari nasi bungkusnya yang sangat dikit dengan lauk seadanya dalam bungkus tersebut. Begitu Angkringan Pak Gik buka, tempat ini mulai diserbu oleh para penikmat nasi kucing, semakin larut justru semakin ramai. Terlebih lagi jika memasuki waktu *weekend*, seperti hari jumat dan sabtu, dapat dipastikan tengah malam di jalan Gajah Mada dipenuhi parkir mobil dan di sebelah jembatan terdapat banyak parkir motor, yang ingin menikmati sajian kucingan Pak Gik tersebut.

Untuk menu yang tersedia di Warung Nasi Kucing Pak Gik amat beragam yakni selain nasi kucing ada juga gorengan dan menu makanan kecil lain dengan suguhan yang hangat, mendoan, pangsit, tahu petis, sate bakso, pia pia, dll. Untuk menu nasi terdapat

nasi kering, nasi babat telur, nasi gurih, nasi tahu telur, ketan kering dsb. Minuman yang disediakan pun beragam, seperti teh hangat, kopi, susu, jeruk hangat, wedang jahe dan sirup. Namun yang paling khas adalah teh hangatnya yang kental dan manis. Meminum teh panas legi kentel atau nasgitel dengan tatakan atau langsung dari gelasnya pada dini hari di pinggir Kali Semarang memang menyenangkan. Kehangatan teh tersebut berbaur menjadi satu dengan suasana kali dan tiupan angin dini hari. Nasi bungkus yang begitu beragam masih dalam keadaan hangat ketika disajikan di atas meja yang panjang.

Belum lagi dengan cemilan-cemilan seperti sate keong, gorengan yang beragam, pangsit dan lain sebagainya. Rotasi makanannya pun sangat cepat, satu keranjang yang terisi nasi bungkus penuh akan cepat habis dalam waktu yang singkat, kemudian beberapa saat datang lagi orang yang membawa keranjang penuh dengan isinya untuk mengisi kekosongan yang ada di meja panjang tersebut. Begitu juga dengan pangsit dan berbagai macam gorengan.

Untuk perputaran minumannya pun juga cepat, karena ada orang khusus yang menangani pemesanan minuman di tempat tersebut. Puluhan gelas berisi teh telah disiapkan, tinggal menyesuaikan pesanan dari pendatang, teh tersebut akan diberi es atau dibiarkan panas atau memesan menu minuman yang lain seperti jeruk dan lain sebagainya. Apabila mengunjungi Kota Semarang, harus dijadwalkan untuk mengobati penasarannya akan kenikmatan menikmati nasi kucing Pak Gik yang melegenda.

Satya Adi Kiswara



Pendidikan merupakan instrumen penting dalam pembangunan manusia. Sebagai subyek yang terus menjadi, manusia membutuhkan pendidikan sebagai tungku yang mematangkan akal dan tindakannya; sekaligus membuatnya terus mencari apa yang harus dimatangkan lagi dengan yang dimiliki. Akal dan tindakan manusia dapat berdaya guna tinggi kala pendidikan diselenggarakan secara penuh. Kematangan kemampuan manusia berpengaruh pula dengan cara ia melestarikan kehidupan. Peradaban yang dibangun dengan dasar intelektualitas dan kemahiran bertahan hidup menunjukkan betapa pentingnya persiapan untuk mematangkan kemampuan manusia.

Tujuan pendidikan yang sedemikian besar, sayangnya malah berhenti di lain tempat. Ia justru diantarkan pergi kepada penumpukan kekayaan segelintir. Pendidikan adalah komoditas; diperjualbelikan untukmu yang ingin pandai. Wacana mengenai

pentingnya pendidikan malah menjadi angin yang mengarahkan ihwal pendidikan ke sumur komersialisasi. Ramai kita menimba, semakin mutakhir sumur itu disediakan. Selama kita selalu terpaksa menecerca wajah pendidikan dan terseok membayar pungutan, selama itu pula, disadari atau tidak, berjalannya penyelenggaraan pendidikan terhenti, yang ironisnya, di tempat yang kotor. Sehingga kita harus terpaksa menyeret keluar pendidikan dan jangan sampai tempatnya kini menjadi habitat dan membentuk watak penyelenggaraan pendidikan. Permasalahan mengenai komersialisasi pendidikan memang menjadi perdebatan publik. Namun, itu hanyalah satu sudut kecil saja pada luasnya lingkup penyelenggaraan pendidikan yang amat luas dan pelik.

Permasalahan dalam proses penyelenggaraan pendidikan dapat kita lacak kala ia tidak dilihat secara terpisah antara subyek yang terlibat dengan muatannya. Manusia sebagai subyek yang terlibat di dalamnya, merupakan bagian dari proses sosial dalam masyarakat yang ia diami. Kebergantungan satu dengan lainnya mengisyaratkan apa yang seorang individu miliki harus dibagi dengan yang lainnya. Adapun muatan yang dihadirkan dalam pendidikan tidak benar-benar bebas nilai. Ia memang terpengaruh oleh beragam kondisi.

Keterpenuhan mengenai tujuan penyelenggaraan pendidikan dapat kita periksa dengan membandingkan dokumen landasan penyelenggaraan dan bagaimana sistemnya saat ini. Pembukaan UUD 1945

menyediakan destinasi penyelenggaraan pendidikan. Masing-masing alinea di dalamnya menghadirkan suasana kebatinan pembentukan negara yang hadir melalui kesinambungan satu alinea dengan yang lainnya. Pembentukan negara Republik Indonesia didasari atas perlakuan manusia sebagai obyek penghisapan dalam penumpukan kekayaan segelintir yang mengakibatkan derita berkepanjangan dan perasaan murka terhadap penindasan yang dilakukan oleh pelaku kolonialisme-imperialisme yang menghisap bangsa Indonesia. Bangsa yang diperas untuk membangun rel kereta api, industri perkebunan, dan segala macam infrastruktur strategis bagi pelaku kolonialisme-imperialisme itu lambat laun menyadari bahwa perlu ada perubahan. Kesadaran palsu yang langgeng mulai terkikis dengan wacana pemberdayaan manusia sebagai subyek yang utuh; ide mencapai kemerdekaan dan kebebasan atas penghisapan manusia. Bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa; bahwa penjajahan tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan. Alinea pertama sebagai penegasan mengenai kemerdekaan memiliki relasi yang erat dengan alinea keempat yang memberikan destinasi penyelenggaraan negara: mencerdaskan kehidupan bangsa. Realitas yang ingin dibentuk oleh Pembukaan UUD 1945 ialah negara bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sehingga komitmen atas

kemerdekaan bangsa terhadap segala bentuk penjajahan terus terlaksana. Tidak lain dapat kita maknai bahwa tujuan pendidikan adalah untuk menghasilkan warga negara yang cerdas; bebas dari kekangan semu dan menjadi subyek yang utuh.

Tujuan mulia pendidikan itu, justru diselubungi dengan semacam kerangkeng yang mempersempit tujuan pendidikan. Alih-alih untuk menghasilkan warga negara yang cerdas dan konsisten atas akibat pendidikan sebagai sarana pembebasan dari segala macam bentuk penghisapan, pendidikan justru memperruncing ketegangan antar warga negara. Jargon 'untuk meningkatkan daya saing' menjadi fokus utama mengapa pendidikan harus diselenggarakan. Ia menjadi selubung yang mengaburkan tujuan pendidikan. Warga negara seolah-olah harus bersaing dan 'mematikan' sesamanya dalam kesempatan untuk melestarikan hidup. 'Daya saing' menjadi pola yang melekat dalam penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan menjadi elemen pelengkap dalam kehidupan masyarakat yang individualistik; yang tidak mampu bersaing tidak akan punya kesempatan. Padahal, suasana kebatinan diselenggarakannya pendidikan adalah dalam rangka tolong-menolong; mendidik mereka yang sedang dalam ketertinggalan agar memiliki kematangan dalam melestarikan kehidupan. Nuansa kompetitif ini seperti bertolak belakang dengan tujuan hadirnya negara: ia

hadir untuk menghalau keinginan absolut individu dengan kebaikan bersama sebagai tujuan utamanya.

Pendidikan sekarang, hanya mampu memberikan tujuan akhirnya pada batas 'karir yang menjanjikan'. Mereka yang memenangkan pertandingan finansial dan kemahiran mengikuti prosedur lah yang akan bertahan. Saling menjatuhkan menjadi watak berjalannya proses pendidikan. Lolos berbagai macam seleksi dan menggapai impiannya menjadi manusia termasyhur di muka bumi. Pertanyaan sederhana yang sengaja kita lupakan: Bagaimana dengan mereka yang tersisih?

Pola persaingan dalam proses pendidikan justru menjebak mereka yang mengikuti pendidikan dengan tekun dalam agenda meneruskan penghisapan. Warga negara yang tersisih jelas akan ngekor kepada mereka yang memiliki kemudahan. Mereka yang tersisih harus tabah karena terhalang untuk mengupayakan dirinya menjadi subyek yang utuh. Pertentangan antar warga negara yang memiliki kemudahan dan yang tidak selalu menciptakan kesenjangan. Sangat disayangkan pendidikan dengan tujuan yang mulia itu menghasilkan kondisi yang mengengaskan.

Sekalipun pola kompetitif ini memang dipengaruhi oleh pergaulan global, ada yang dilupakan dalam penyelenggaraan pendidikan. Proses untuk menunjukkan kebenaran dalam masyarakat selalu terlambat datang sekaligus hambar. Tugas untuk

membongkar kesadaran palsu dan menolong mereka yang membutuhkan agar kehidupannya tetap lestari hanya tertulis pada teks visi-misi institusi formal serta kegiatan yang menjadi syarat kelulusan proses pendidikan. Pola persaingan dengan tawaran karir yang menjanjikan inilah yang turut membentuk kesadaran palsu dalam masyarakat bahwa apa yang terjadi sekarang memang baik-baik saja.

Akhirul kalam, dengan kondisi demikian, tugas intelektual muda adalah mencari jejak yang mengarahkan kita pada kesadaran palsu dan membunyikan gendang peringatan agar yang lainnya waspada.

Mencerdaskan kehidupan bangsa...bukankah itu yang harus kita lakukan?

Tegar Padhang Pramudhita (S1 FH Undip)



Tjokroaminoto dan Pergerakannya

Sumber: tengkupertih.com

"Ratu Adil" dan "Raja Jawa Tanpa Mahkota" begitulah julukan bagi sosok Raden Hadji Oemar Said Tjokroaminoto yang lahir di Ponorogo, Jawa Timur, 16 Agustus 1882. Tjokroaminoto berasal dari keluarga bangsawan, kakeknya R.M. Adipati Tjokronegoro pernah menjabat sebagai Bupati Ponorogo dan ayahnya R.M. Tjokroamiseno merupakan salah seorang pejabat pemerintahan pada masa itu. Tjokro menyelesaikan sekolah administrasi pemerintahan di *Opleiding School Voor Inlandsche Ambtenaren (OSVIA)*, Jawa Tengah. Setelah itu, ia menjadi pegawai pemerintah sebagai juru tulis Patih Ngawi.

Tjokroaminoto merupakan sosok yang menentang adanya feodalisme. Ia berhenti dari pekerjaannya sebagai juru tulis Patih Ngawi dan melepaskan gelar Raden Mas-nya, hal inilah yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara Tjokro dan mertuanya yang merupakan Wakil Bupati Ponorogo Raden Mas Mangoensoemo. Tjokro meninggalkan rumah sang mertua dan pergi

menuju Semarang, karena ia tidak setuju dengan sikap mertuanya yang terlalu tunduk pada penjajah.

Di Semarang, Tjokro bekerja menjadi kuli pelabuhan. Disini ia benar-benar memahami keadaan kelas bawah dan hal inilah yang mempengaruhi cara pandangnya dalam memperjuangkan kaum buruh. Tak lama di Semarang, Tjokro lalu pindah ke Surabaya dan tinggal di Jalan Peneleh, ia bergabung dengan Firma Kooy & Co dan mendapatkan posisi di bagian administrasi. Setahun kemudian ia mendengar kabar bahwa istrinya melahirkan dan kembali ke Ponorogo. Tjokro memboyong anak-istrinya untuk tinggal bersamanya di Surabaya.

Tak pernah puas dalam menimba ilmu, Tjokro mempelajari disiplin ilmu baru, ia menempuh pendidikan di *Burgelijke Avond School*, sebuah kursus teknisi. Dengan keahlian barunya ia keluar dari firma dan bekerja di pabrik gula Regojampi sebagai teknisi lalu berganti posisi sebagai ahli kimia. Tetapi lagi-lagi ia berhenti karena merasa iklim pe-

rusahaan yang masih dipenuhi dengan unsur-unsur kolonial yang jelas tidak ia sukai. Pada awal tahun 1912, ia melanjutkan kariernya di sebuah biro teknik di Surabaya. Untuk menambah pemasukan, istri Tjokro membuka kos-kosan dirumahnya. Soekarno, Musso, Kartosuwiryo, Semaoen, Alimin adalah tokoh-tokoh yang pernah berguru dan tinggal di rumahnya. Rumah Tjokro di gang Peneleh itu dijadikan tempat bertemunya sejumlah tokoh yang berbeda ideologi tapi sekaligus sebagai rumah berdialog dan berdiskusi para tokoh tersebut. Guru Para Pendiri Bangsa begitu pula julukan yang ditujukan kepada sosok Tjokroaminoto yang berwibawa dan karismatik menjadi teladan bagi para pendiri bangsa yang pernah berguru padanya. Mereka banyak belajar dengan melihat gaya kepemimpinan gurunya tersebut. Walaupun mereka akhirnya menempuh jalannya masing-masing. Soekarno merupakan pendiri Partai Nasional Indonesia, Musso, Alimin dan Semaoen menjadi pemimpin Partai Komunis Indonesia dan Kartosoewirjo menggagas Negara Islam melalui gerakan Darul Islam (DI/TII).

Tjokro juga merupakan jurnalis, ia mulai aktif menyampaikan pemikirannya tentang memajukan bangsa dengan menulis di beberapa surat kabar seperti Bintang Soerabaja. Karena tulisanya, Tjokro mulai dikenal luas hingga pimpinan dari Sarekat Dagang Islam yakni organisasi yang bertujuan untuk melindungi saudagar batik pribumi dari tekanan pedagang Cina dan kaum ningrat solo yaitu Haji Samanhoedi memintanya ke Surakarta untuk membantu organisasi

tersebut. Tjokro bergabung dengan Sarekat Islam mulai Mei 1912. Setelah bergabung dengan Sarekat Islam Tjokro diberi mandat untuk merumuskan anggaran dasar organisasi tersebut. Anggaran tersebut terdiri atas penjelasan organisasi, tujuan, syarat pembentukan, keanggotaan, struktur, dan mekanisme rapat. Tjokro bukanlah pendiri Sarekat Islam melainkan pendirinya adalah Haji Samanhoedi. Kepemimpinan Samanhoedi berbeda jauh dengan Tjokro. Tjokro yang disebut sebagai Ratu Adil ini lebih terkenal dibandingkan Samanhoedi, Tjokro memiliki daya tarik dan karismatik yang sangat memukau, dapat dilihat dari gayanya berpidato, suaranya yang menggelegar yang mampu membius para pendengarnya. Tjokro merupakan sosok yang tak memandang usia, status maupun jabatan. Sarekat Islam dibawah kepemimpinannya tak hanya berupaya melindungi kaum pribumi dalam perdagangan, melainkan ada kepentingan untuk memajukan kesejahteraan dan pendidikan umat Islam serta membawa Sarekat Islam ke level nasional. Hal inilah yang menyebabkan Sarekat Islam banyak memperoleh dukungan dan berkembang pesat berdiri di beberapa daerah serta memiliki anggota yang banyak.

Tjokro merupakan sosok yang pandai berdiplomasi, dalam melaksanakan perjuangannya Tjokro berada dibawah perlindungan pemerintah Belanda. Ia memilih bersikap kooperatif agar dapat membesarkan Sarekat Islam. Ia memanfaatkan kedekatannya dengan beberapa orang Belanda seperti Douwes Adolf Rinkes

yang merupakan ilmuwan Belanda sekaligus menjabat sebagai penasihat pemerintah belanda. Berkat perjuangan yang kooperatif akhirnya SI pusat diberi pengakuan sebagai Badan Hukum. Setelah pemerintah memperbolehkan berdirinya partai politik, SI berubah menjadi partai politik dan mengirimkan wakilnya yaitu Tjokroaminoto dan Abdoel Moeis ke Volksraad tahun 1917. Volksraad atau Dewan Rakyat merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Belanda. Sikap kooperatif Tjokro justru mendapatkan kecaman dari anggota SI salah satunya adalah Semaoen yang menyatakan bahwa Tjokro mendua bahkan mencibirnya sebagai antek Belanda.

Pamor Tjokro lambat laun tenggelam, banyak isu-isu penyelewengan yang menimpanya serta penangkapan dirinya atas tuduhan kerusuhan di *Afdelling B* dan juga seiring dengan perpecahan di tubuh SI. Perpecahan itu disebabkan oleh masuknya paham Sosialisme-Revolutioner yang dibawa oleh H.J.F.M. Sneevliet yang disebarkan melalui ISDV dan VSTP dengan melakukan infiltrasi ke dalam tubuh Sarekat Islam. Proses penyusupan paham Sosialisme-Revolutioner itu dilakukan Sneevliet melalui Semaoen. Semaoen yang merupakan rekan Tjokro di SI dan sebagai ketua Sarekat Islam Semarang sekaligus sebagai propaganda gerakan sosialis-revolutioner mulai melancarkan gerakan-gerakan yang menentang pemerintah. Semaoen mengorganisir kaum buruh dan tani dengan membentuk setral-sentral Sarekat Sekerja. Dalam kongres tahun 1917, secara

resmi Sarekat Islam Semarang menyatakan bahwa partai pecah menjadi 2, yaitu Sosialis-revolutioner (SI Merah) dibawah Semaoen dan perjuangan berdasarkan agama Islam (SI Putih) dibawah Tjokroaminoto. Puncak perselisihan terjadi pada kongres SI di Surabaya 1919. Dalam kongres ini, dilaksanakannya disiplin partai dan melarang kadernya memiliki organisasi lain. Semaoen yang merupakan Ketua Perhimpunan Komunis Indonesia dikeluarkan dari SI. Pada 1920, Semaoen mengambil alih ISDV dan mengganti namanya menjadi Partai Komunis Indonesia. Partai ini didominasi oleh anggota SI merah.

Walau gagal menyatukan kembali SI yang terpecah. Tetapi Sikap berani, cerdas, kritis dan kesungguhannya dalam memajukan dan membangkitkan bangsa Indonesia kala itu dan jasanya bagi perjuangan pergerakan nasional tidak akan pernah terlupakan. Tjokro merupakan salah satu pejuang pergerakan nasional yang membangkitkan kesadaran rakyat untuk mencapai kemerdekaan, Tjokroaminoto telah meletakkan dasar-dasar persatuan yang kelak merupakan fondasi berdirinya negara ini. Sungguh saat ini negara mendambakan sosok seperti yang memiliki tekad dalam memajukan bangsa di tengah krisis yang melanda.

Nurul Aini Kamal

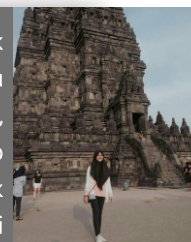
Komersialisasi Pendidikan, Pantaskah?



Anisa Fitriana
FH Undip 2017

Dapat dikatakan komersialisasi pendidikan apabila untuk bisa masuk pada suatu lembaga pendidikan dibutuhkan suatu biaya. Tetapi sepanjang komersialisasi ini ditujukan pada pihak yang tepat untuk fasilitas maupun proses pembelajaran, maka itu sah-sah saja. Saya setuju dengan adanya komersialisasi pendidikan, karena dana APBN 20% tidak dapat memenuhi pembelajaran dalam pendidikan secara maksimal. Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Komersialisasi tidak boleh disalahgunakan untuk mengeruk keuntungan bagi lembaga pendidikan, tetapi komersialisasi hanya boleh dilakukan untuk memenuhi fasilitas yang tidak ter-cover oleh APBN maupun APBD.

Komersialisasi pendidikan itu pendidikan yang diarahkan untuk mencari keuntungan. Saya tidak setuju dengan hal tersebut, karena pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan suatu individu atau masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan. Jika komersialisasi pendidikan dilakukan, maka hanya masyarakat kalangan atas saja yang dapat menikmati, bagaimana nasib masyarakat kalangan bawah. Setiap anak bangsa berhak mendapatkan pendidikan yang layak karena sudah diatur dalam UUD 1945. Mencerdaskan suatu bangsa itu didapat melalui pendidikan, jika pendidikan itu dikomersialisasikan maka bagaimana negara ini akan maju.



Resti Prabandari
FH Undip 2015



Sandi Kurniawan
FH Undip 2016

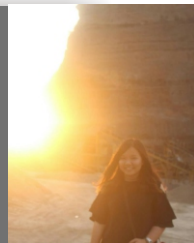
Menurut saya, di setiap tahap pendidikan pasti terdapat celah dimana ada oknum yang memperjualbelikan suatu pendidikan. Saya tidak setuju dengan adanya komersialisasi pendidikan. Dari segi non hukum, sebagai manusia pasti merasa tidak terima dengan adanya biaya pendidikan yang dipermahal, karena hanya orang-orang tertentu saja yang dapat mengenyam pendidikan, padahal dari segi hukum sudah diatur dalam UUD 1945 pasal 31 ayat 1 "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan". Jadi setiap anak bangsa berhak mendapat pendidikan, karena lembaga pendidikan sudah disubsidi 20% dari APBN. Komersialisasi pendidikan sebenarnya bisa dikurangi, tergantung dari kerjasama tiap elemen masyarakat maupun dari pihak guru atau pihak kementerian. Karena percuma saja jika peraturan yang diberikan oleh pemerintah tidak dilakukan dengan bijak.



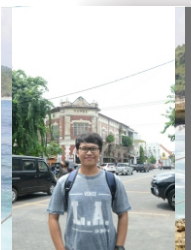
Cakra Utama
FH Undip 2015

Komersialisasi pendidikan merupakan perdagangan pendidikan, yang artinya hanya orang-orang tertentu saja yang bisa mengenyam dan mendapatkan pendidikan yang layak. Saya tidak setuju dengan adanya hal tersebut, karena masih banyak orang yang ingin mendapatkan pendidikan tetapi karena keterbatasan biaya dan adanya biaya yang mahal mereka tidak bisa merasakan pendidikan. Semua orang berhak mendapatkan pendidikan yang layak, keterbatasan biaya bukan merupakan penghalang bagi setiap orang untuk mengenyam pendidikan. Saya juga tidak setuju apabila komersialisasi dilakukan untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan orang-orang tertentu.

Sebutan dari komersialisasi pendidikan bagi lembaga pendidikan menurut saya tidak benar, karena dalam pendidikan tidak mencari suatu keuntungan. Setiap anak bangsa harus memiliki dan mendapatkan pendidikan yang layak, karena itu merupakan suatu tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke empat dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan bukan tentang alat atau IPTEK yang harus diterima mereka, tetapi yang terutama adalah bagaimana cara mereka dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan betul-betul menguasai ilmu pengetahuan yang mereka dapat dari suatu pendidikan tersebut.



Veronica Elisabeth
FH Undip 2016



Naufal Lestama
FH Undip 2017

Komersialisasi pendidikan merupakan suatu upaya untuk membantu pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan. Saya setuju apabila komersialisasi pendidikan berjalan sesuai tujuan utamanya yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun saya tidak setuju apabila komersialisasi pendidikan memungut biaya tetapi tidak ada fasilitas yang setimpal dengan biaya yang sudah dikeluarkan. Segenap warga Indonesia baik anak-anak di kota maupun di daerah berhak mendapatkan pendidikan yang layak dengan fasilitas dan sumber daya manusia yang setimpal untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Pendidikan merupakan kebutuhan yang esensial, maka Negara berhak dan berkewajiban untuk memenuhi pendidikan bagi segenap bangsa Indonesia. Komerisalisasi pendidikan bukan merupakan hal untuk dibisniskan apalagi melupakan kualitas dari pendidikan itu sendiri.

Cystania



Museum Ronggowarsito, Upaya Menolak Lupa Sejarah Kota Semarang

Di antara sekian banyak tempat wisata yang ada, Kota Semarang menyimpan banyak cerita dan peninggalan sejarah salah satunya adalah Museum Ronggowarsito. Selain tempatnya yang strategis tempat ini juga dikelilingi berbagai tempat wisata sehingga Museum Ronggowarsito menjadi tempat kunjungan wajib bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kota Semarang. Palsnya tidak hanya sejarah tentang dirinya sendiri yang terdapat dalam bangunan megah ini. Sekian banyak wisata yang ada di Kota Semarang pun ada didalamnya.

Museum Ronggowarsito merupakan museum yang terletak di jalan Abdurrahman Saleh, Kota Semarang, Jawa Tengah. Di dalamnya terdapat benda-benda bersejarah seperti fosil, miniatur bangunan Jawa, benda peninggalan masyarakat Jawa yang bercorak Hindu-Budha dan Islam, miniatur peperangan beserta peralatannya yang terjadi di pulau Jawa dan lain sebagainya. Museum ini dibangun dengan dana dari proyek rehabilitasi dan perluasan per-museuman Jawa Tengah dan pem-bangunan fisik yang dilakukan secara bertahap. Arsitekturnya adalah Ir. Totok Rusmanto dari Universitas

Diponegoro, sedang pengawas pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh PT Guna Dharma Semarang. Dibangunnya museum Ronggowarsito ini mendapat banyak dukungan dari masyarakat setempat, masyarakat Jawa Tengah khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Sejak diresmikan tanggal 5 Juli 1989, Museum Jawa Tengah Ronggowarsito semakin eksis di tengah masyarakat. Pengunjungnya, bertambah setiap saat, tua-muda, besar-kecil, siswa sekolah maupun masyarakat umum selalu memadati museum, apalagi di saat hari libur nasional, dan liburan sekolah.

"Museum ini mempunyai banyak fasilitas yang dapat di nikmati oleh pengunjungnya seperti ada ruangan bioskop mini yang memutar film-film sejarah dan museum ini juga menyediakan toko souvenir untuk para pengunjung yang ingin membeli cendramata khas Jawa Tengah" Ujar salah satu pengunjung di museum ronggowarsito. "Hanya saja lokasinya yang terletak di Semarang bawah dan dekat dengan laut sehingga menyebabkan udara di museum begitu panas" Lanjutnya.

Bentuk museum ini me-

rupakan perpaduan dari gaya klasik, joglo, dengan kontruksi modern dilengkapi sarana trancheail, auditorium, perkantoran, perpustakaan, laboratorium, gudang dan taman. Di bagian paling depan ruangan musuem terdapat patung Ronggowarsito dan tulisan Kalatidha, setelah melewati bangun-an tersebut kita dapat melihat tugu pengesahan museum Ronggo-warsito. Ada 4 gedung utama pameran tetap yang masing-masing terdiri dari 2 lantai. Tata penyajian pameran mengacu pada konteks "eksistensi manusia Jawa Tengah dan lingkungannya" dengan menggunakan 3 pendekatan yaitu, intelektual, estetis, dan romantis atau evokatif yang dipergunakan dalam 8 ruang pameran tetap meliputi ruang sejarah alam, ruang paleoontologika, ruang sejarah budaya prasejarah, ruang sejarah perjuangan bangsa, ruang etnografika, ruang kesenian, ruang pembangunan, ruang koleksi nusantara.

Harga tiket masuk yang dikenakan Museum Ronggowarsito sebesar Rp 2.000 untuk anak-anak, serta Rp 4.000 untuk dewasa. Dibalik semua fasilitas yang ada,seharusnya pemerintah lebih gencar mengenalkan Museum Ronggowarsito kepada masyarakat luas agar masyarakat lebih mengetahui objek wisata yang beredukasi di Semarang,selain objek-objek wisata yang sudah terkenal.

Annisa Rahma Wulandari



Berbicara tentang Indonesia maka tidak akan lepas dari cerminan suatu negara yang kaya akan keragaman suku, budaya, dan alamnya. Keragaman ini memberikan ciri khas tersendiri yang memiliki keunikan di masing-masing daerah di Nusantara. Adapun salah satu bentuk keunikan budaya di Indonesia dapat kita jumpai pada permainan-permainan tradisional seperti yang ada di sekitar Kota Semarang seperti engklak, egrang, kelereng, dan lain sebagainya. Namun, seiring bergulirnya perkembangan zaman dan gempuran era globalisasi membuat masyarakat terutama anak-anak sudah tidak menggandrungi permainan tradisional seperti dulu lagi, padahal permainan-permainan tradisional tersebut sudah seharusnya menjadi sebuah kearifan lokal dan salah satu bentuk budaya yang harus terus dilestarikan dari generasi ke generasi.

Kenyataan yang mengkhawatirkan tersebut menjadi pemicu terbentuknya sebuah komunitas sosial yaitu Komunitas Hompimpa Semarang. Komunitas Hompimpa berpusat di kota Tangerang, Banten yang didirikan dan sekaligus diketuai oleh Muhammad Miftah yang kemudian membuat cabang regional, salah satunya di Kota Semarang yang saat ini diketuai oleh Ahmad Misbahul Munir. Komunitas Hompimpa di Semarang sen-

diri memiliki berbagai kegiatan sebagai dari usaha untuk memperkenalkan permainan tradisional dan melestarikannya kepada anak-anak Kota Semarang zaman sekarang. Kegiatan tersebut seperti Hompimpa ke sekolah, Hompimpa ke kampung, kegiatan rutin 2 minggu sekali membuka stand permainan di CFD Kota Semarang, membuka penyewaan alat permainan tradisional, dan open recruitment untuk anggota komunitas Hompimpa.

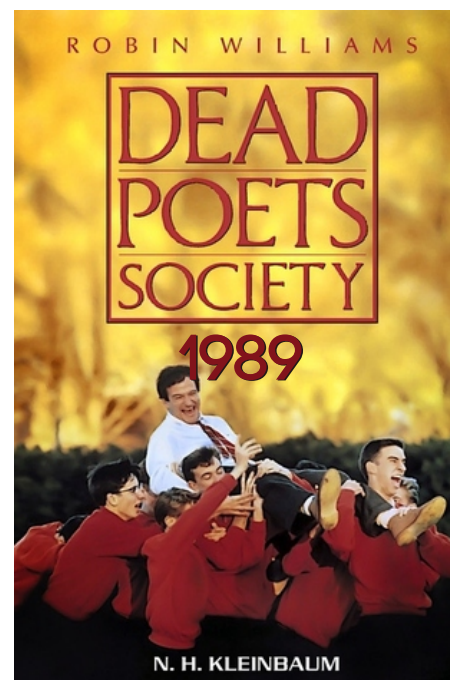
Komunitas Hompimpa Semarang ini sudah cukup dikenali oleh masyarakat kota Semarang dan juga mendapat respon yang baik dari kalangan masyarakat, "Antusiasnya bagus sih, dari acara-acara yang kita lakukan mesti mereka *nanyain* kapan ada lagi, dimana, seperti itu". Ucap Munir. Selain antusiasme yang baik dari masyarakat, komunitas Hompimpa Semarang juga telah meraih beberapa penghargaan dari universitas dan salah satu media cetak yang ada di Kota Semarang. Selain itu, Komunitas Hompimpa pernah diliput oleh stasiun TV nasional dan stasiun TV swasta nasional, selain itu juga seringkali Komunitas Hompimpa diajak kerjasama oleh mahasiswa-mahasiswa Universitas yang ada di Semarang ketika mahasiswa tersebut hendak melangsungkan Kuliah Kerja Nyata ataupun ketika ada suatu acara.

Adapun dalam proses ke-

giatan yang dilakukan oleh anggota Hompimpa Semarang ini seringkali mendapat beberapa hambatan seperti keterbatasan alat-alat permainan tradisional, kekurangan tenaga volunteer, dan keterbatasan dana karena selama ini menjalankan kegiatannya bersumber pada iuran dari para anggotanya dan juga dari hasil penyewaan alat permainan tradisional. Menurut Munir tantangan dari upaya komunitas ini untuk mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anak jaman sekarang adalah peranan orang tua untuk lebih mengenalkan permainan tradisional kepada anak-anaknya karena tanpa peran orang tua maka upaya yang telah dilakukan oleh para anggota Komunitas Hompimpa Semarang menjadi kurang melekat oleh anak-anak. "Jadi misi kita pun, berharap dari orang tuanya setelah main di situ (*stand*) lebih bisa mengenalkan lagi, apa permainan tadi yang dimainkan saat CFD tadi". Ucap Munir selaku ketua Komunitas Hompimpa Semarang.

Sangat disayangkan apabila permainan tradisional ini tidak dilestarikan kepada generasi muda Indonesia, padahal dari segi kemanfaatan banyak yang dapat diperoleh dari permainan tradisional ini dibandingkan dengan permainan yang ada di *gadget* seperti melatih gerak olah tubuh, melatih syaraf motorik anak, meningkatkan sosialisasi anak dengan anak lainnya sehingga anak akan lebih sehat dari segi fisik dan segi sosialnya.

Gallih Aji Pangestu



Sumber: goodreads.com



Dead Poets Society, sebuah film yang dirilis pada tahun 1989 ini menceritakan tentang fenomena dunia pendidikan sekitar tahun 1970-an. Film yang diperankan oleh Robert Sean Leonard sebagai Neil Perry, Robin Williams sebagai Mr. Keating, Joe Auferly sebagai kepala sekolah, Gale Hansen sebagai Charlie Dalton, Ethan Hawke sebagai Todd Anderson, dan juga pemeran lainnya. Film yang menggunakan alur maju ini, berada di bawah Touchstone Pictures Production House yang juga disutradarai oleh Peter Weir.

Film ini berawal dari seorang Ayah yang menyekolahkan anaknya bernama Neil Perry ke sebuah sekolah bernama Welton Academy, sekolah asrama yang menganut 4 prinsip, yaitu tradisi,

kehormatan, disiplin, dan prestasi. Seperti kebanyakan siswa di sekolah tersebut, alasan Neil untuk masuk adalah lebih karena untuk melaksanakan perintah dari orang tuanya. Ayahnya menyuruhnya untuk keluar dari penyuntingan buku tahunan, karena dianggap mengganggu prestasi belajarnya, Neil tidak mampu menolak, meskipun Neil menikmati kegiatan tersebut. Kenyataan seperti itu tidak hanya dialami oleh Neil saja, namun juga teman-temannya di sekolah itu.

Dalam rangka untuk melaksanakan prinsip yang diterapkan di Welton Academy, guru yang mengajar pun sangat keras serta disiplin terhadap para siswanya. Tidak jarang upaya tersebut mengakibatkan proses pembelajaran menjadi sangat

monoton dan membosankan.

Namun, kondisi yang berbeda dialami oleh para siswa saat Mr. Keating, guru bahasa Inggris yang baru mengajar. Metode pengajarnya terlihat jelas berbeda. Ketika Mr. Keating masuk ke kelas, para siswa sangat terkejut dan menganggap guru tersebut aneh. Saat dimulainya kelas, seorang siswa diminta untuk membaca pengantar buku tentang puisi, yang menyebutkan bagaimana menilai kualitas sebuah puisi yang dapat diukur dan diberi skala. Kemudian Mr. Keating meminta siswanya untuk merobek seluruh halaman buku tersebut. Meskipun menunjukkan hal yang tidak biasa, lambat laun para siswa mulai memahami dan akhirnya mengagumi guru baru tersebut. Neil dan teman-temannya sangat tertarik

kepada sosok Mr. Keating.

Sehingga ketertarikan itu membuat mereka mencari tahu lebih banyak. Pada suatu saat yang mereka ketahui adalah semasa mudanya dulu Ia memiliki komunitas, yang disebut sebagai “*the Dead Poet’s Society*”. Hal ini mengakibatkan Neil dan kawan-kawannya terinspirasi untuk melakukan hal yang sama. Mereka kembali menghidupkan komunitas dan dilakukan secara diam-diam. Begitulah Mr. Keating telah banyak membawa pengaruh kepada Neil dan kawan-kawannya.

Hingga pada puncaknya film ini, terdapat adegan jika Neil berani melawan perintah ayahnya. Neil yang memiliki keinginan mendaftar sesuatu dan demi melaksanakan sesuatu yang diinginkan, Neil memalsukan surat ijin dari ayahnya. Namun pada akhirnya, ayahnya mengetahui perbuatannya itu. Neil tetap bersikeras untuk ikut dan atas saran Mr. Keating, dia membicarakan maksud dan keinginannya. Memang kemudian ayahnya mengizinkan Neil untuk ikut, tetapi sesuai itu, Neil dibawa pulang ke rumah oleh ayahnya. Ayahnya menyampaikan keputusannya untuk mengeluarkan Neil dari sekolahnya dan memasukkannya ke sekolah militer. Sebenarnya Neil tidak menyukai rencana itu, tetapi dia tidak mampu untuk menolaknya. Hingga hal yang tak terduga terjadi dalam film ini.

Kejadian yang dialami oleh Neil ini menjadi awal dari terungkapnya komunitas yang dihidupkan olehnya dan teman-

temannya. Pihak sekolah tidak mau nama sekolahnya tercemar dan akhirnya mengkambing hitamkan Mr. Keating. Di bawah tekanan, siswa yang tergabung dalam komunitas tersebut dipaksa untuk menandatangani surat yang menyatakan Mr. Keating bersalah atas kejadian ini. Dan akhirnya, Mr. Keating yang memang banyak berpengaruh kepada siswanya menjadi pihak yang dianggap bersalah. Akhirnya, Mr. Keating dibebastugaskan dari *Welton Academy*.

Dari film *Dead Poets Society* ini banyak nilai-nilai yang dapat dipetik, diantaranya nilai pendidikan, nilai moral, dan nilai kebersamaan. Pesan lain yang ingin disampaikan adalah melalui kata-kata, “*raihlah kesempatan (carpe diem)*” yang menjadi suatu alasan dan pendorong bagi siswa-siswa untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Film yang juga mengupas kritik mengenai pendidikan di Inggris melalui diterimanya seorang guru baru yang memiliki metode pembelajaran yang berbeda, yang lebih menekankan “kebebasan”, kebebasan berpendapat dan menginginkan sesuatu hal tanpa diberi beban. Film ini adalah film yang menginspirasi bagi kehidupan, terutama dengan obyeknya yaitu para remaja yang dimana menjadi harapan orang tua di masa yang akan datang untuk meraih kesuksesan. Namun, jika kita melihat konflik yang terjadi dalam film tersebut kebanyakan orang tua tidak memperhatikan minat

serta bakat dari anaknya sendiri, seyogyanya orang tua mendukung apa yang disenangi dan digemari anaknya bukan malah memberi tekanan kepada buah hatinya. Film ini pun menjadi refleksi yang mana sekolah selalu berpegang pada prinsip konvensional dan tidak mau mengembangkan proses belajarnya yang mampu menarik siswa dalam mencerna dan memahami mata pelajaran yang diperoleh. Kebanyakan kebijakan yang diterapkan kurang berpihak kepada siswa dan cenderung menjadikan siswa menjadi apatis dan individualis. Namun, film ini juga memiliki kelemahan, yaitu dengan bahasa yang terlalu tinggi dan berlebihan sehingga mengakibatkan kebingungan dalam menangkap intisarinnya.

Yulia Andriyani

Mabuk Laut Debut Mini Album dari The Panturas

Nama The Panturas belakangan sering muncul dalam *line up* acara-acara musik *indie* di Bandung maupun luar Bandung. Baru-baru ini, The Panturas berhasil masuk ke dalam jajaran artis pengisi panggung acara musik berskala Internasional yang diadakan di Jakarta yaitu *We The Fest*. Band yang dibentuk di penghujung tahun 2015 ini membawakan musik jenis *surf rock* yang mana merupakan salah satu jenis musik yang jarang dibawakan di Indonesia. Musik *surf* merupakan sub genre dari musik rock yang ental dengan nuansa *surfing* yang berkembang pertama kali di kawasan California Selatan, Amerika. *Genre* musik ini mencapai kepopuleran pada tahun 1962 hingga 1964 dalam dua bentuk utama. Pertama adalah *surfing* instrumental yang sebagian besar dipelopori oleh band Dick Dale dan DelTones, dan yang kedua adalah *surfing* vokal oleh band Beach Boys.

The Panturas yang digawangi

Abyan Zaki (vokal/gitar), Rizal Taufik (gitar), Surya Fikri alias Kuya (drum) dan Bagus Patrias (bass) terbentuk di Jatinangor sejak tahun 2015 ini mencoba mendobrak sistem geografis dalam sebuah band. Terbentuk di dataran tinggi, tidak menjadi penghalang untuk The Panturas dalam menciptakan band dengan *genre* yang bericiri khas pantai tersebut. Setelah dua tahun terbentuk, band The Panturas akhirnya merilis album perdana bertajuk *Mabuk Laut* yang dirilis di bawah naungan La Munai Records. Album *Mabuk Laut* terdiri dari 7 buah lagu yakni; Tenggelamkan, Fish Bomb, Arabian Playboy, Pergi Tanpa Pesan, Sunshine, Fisherman Slut dan Gurita Kota yang dirilis sebagai single.

Album *Mabuk Laut* ditulis berdasarkan pengalaman empat anggota band The Panturas yang tak selalu menemukan hal positif ketika ke pantai atau laut yang kemudian mereka tuangkan ke dalam beberapa lagu. Sebagai contoh lagu

Fisherman Slut yang sebelumnya sudah dirilis sebagai lagu lepas pada Januari 2017. Tembang itu bercerita tentang pekerja seks komersial yang dibawa nelayan ketika melaut. Terkadang hal itu menyebabkan perdagangan manusia di tengah laut. Adapun lagu *Fish Bom* bercerita tentang nelayan yang menangkap ikan menggunakan bom. Alih-alih mendapat ikan, bom itu malah meledak di rumah nelayan dan menyebabkan kematian temannya. Oleh karenanya Lewat album ini Band The Panturas ingin menyampaikan bahwa pantai dan laut bukan hanya tempat untuk bersenang-senang saja melainkan banyak permasalahan didalamnya, serta mengajak semua orang agar lebih peduli dan menjaga laut dan lingkungannya.

Lagu-lagu di dalam Album *Mabuk Laut* ini memiliki keragaman dalam mempersembahkan cita rasa ke telinga pendengar. *Genre surf rock* yang kerap me-



Sumber: mavemagz.com

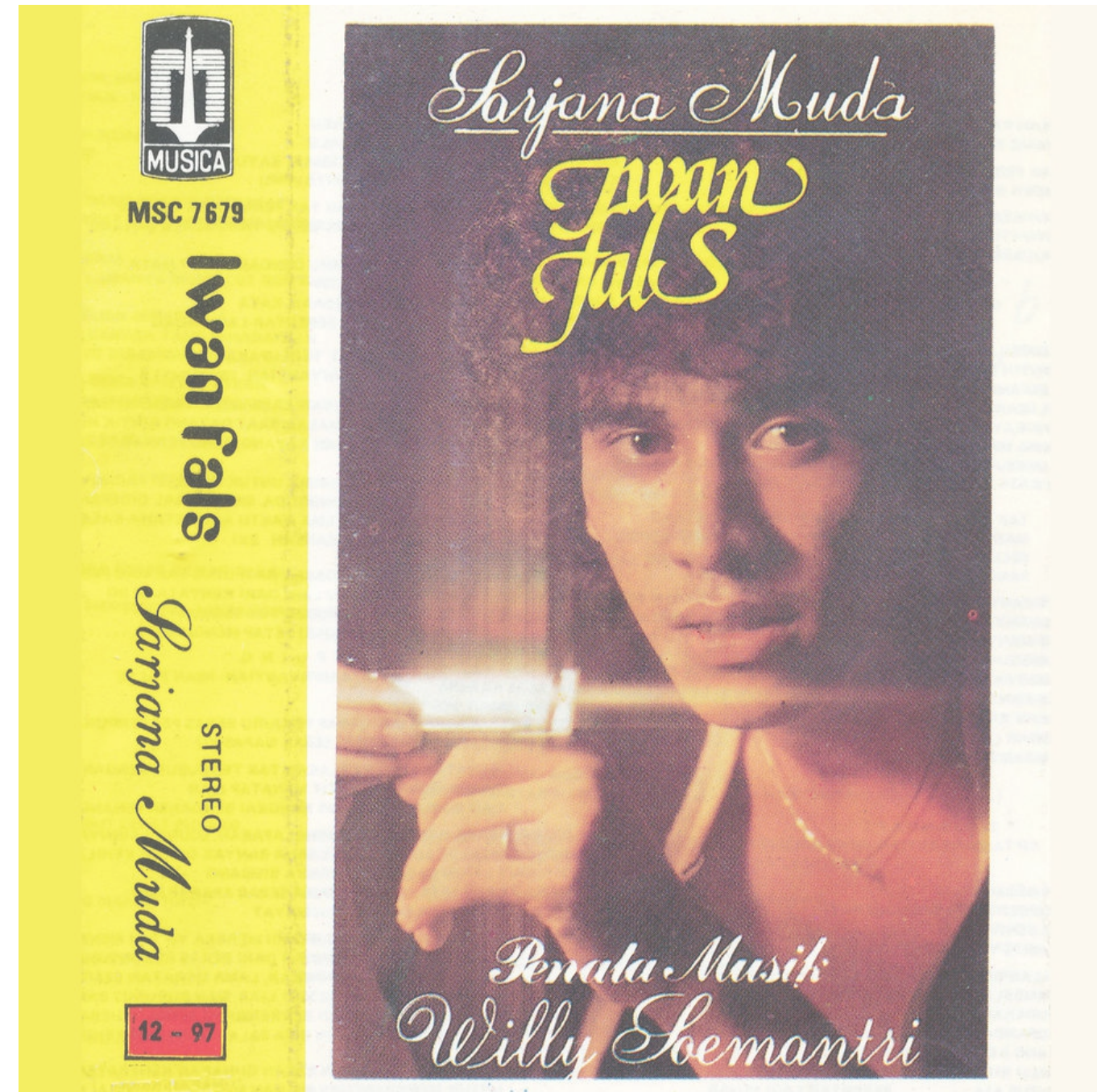
miliki ritme *up beat* dicampur-adukkan dengan mudahnya oleh The Panturas. Tembang berjudul *Sunshine* milik mereka menjadi penyegar sekaligus penenang di tengah ke enam tembang bisung yang mereka suguhkan. Tembang tersebut pun secara tidak langsung meyakinkan pendengar bahwasanya *surf rock* dapat menjadi humanis nan melankolis. Untuk sebuah band baru, mereka juga membuka diri untuk berkolaborasi dengan Oscar Lolang, salah satu penyanyi solo yang memiliki suara *gospel* sehingga memberikan kesan

mistik pada genre yang tak jarang menimbulkan *crowd surf* di antara penonton. Kolaborasi mereka dapat didengar pada tembang *Arabian Playboy*. Jumlah ganjil nan sedikit yang mereka luncurkan untuk sebuah album bukanlah merupakan halangan untuk menyajikan dua bentuk utama dari musik *surf rock*, yakni *surfing instrumental* dan *surfing vocal*. Tembang *Tenggelamkan dan Pergi Tanpa Pesan* menjadi sebuah musik instrumental yang menjadikan mereka sebagai bentuk representasi dari Dick Dale dan Del-Tones. Kelima lagu lainnya

yang berbentuk *surfing vocal* tidak lain dan tidak bukan menjadikan mereka representasi dari band *Beach Boys* tidak dapat dipatahkan.

Bagi yang merasa penat mendengarkan lagu-lagu *Electronic Dance Music* (EDM) atau dangdut koplo kala terjebak macet di jalan, dapat mencoba mendengarkan sensasi baru yang disuguhkan The Panturas dengan dominasi *beat* yang sama cepatnya dengan supir truk Pantura saat menahkodai kendaraannya.

Fahmi Arifsyah



*Engkau sarjana muda
resah mencari kerja
Mengandalkan ijazahmu*